

**PERAN PEMERINTAH GAMPONG KRUENG KALEE
KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH
BESAR DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
PEREMPUAN**

SKRIPSI

**Diajukan Oleh:
NAILUL AUFAR
NIM. 190802105**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nailul Aufar
NIM : 190802105
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Gampong Cot, 8 Agustus 2001
Alamat : Gampong Cot, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar, Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkannya dan mempertanggungjawabkannya.
2. Tidak menggunakan tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran sendiri.
3. Tidak menggunting-tempel tulisan orang lain tanpa menyebutkan sumber asli dengan jelas
4. Tidak menyerahkan karya orang lain sebagai karya ilmiah saya.
5. Apabila terbukti melakukan pelanggaran hal-hal tersebut di atas, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pembatalan gelar akademik yang saya peroleh dari karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang sah bahwa memang ditemukan adanya plagiarisme atau penjiplakan dalam karya saya, saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan ketentuan akademik yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.


Nailul Aufar
NIM. 190802105

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERAN PEMERINTAH *GAMPONG KRUENG KALEE* KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH BESAR DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (SI) Dalam Ilmu Administrasi Negara

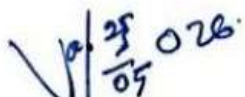
Oleh:

NAILUL AUFAR
NIM. 190802105

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

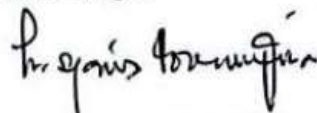
Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.
NIP. 196110051982031007

Pembimbing II,



Hijrah Saputra, S.Fil.L., M.Sos
NIP. 199007212020121016

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI
PERAN PEMERINTAH *GAMPONG KRUENG KALEE*
KECAMATAN DARUSSALAM KABUPATEN ACEH
BESAR DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
PEREMPUAN

Disusun Oleh:
Nailul Aufar
NIM. 190802105

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu/01 Juli

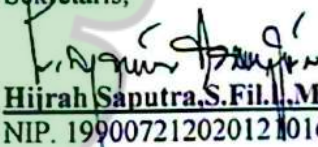
Banda Aceh,
Panitian Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Dr. Sajid Amirul kamar, MM., M.Si

NIP. 196110051982031007

Sekretaris,


Hijrah Saputra, S.Fil., M.Sos

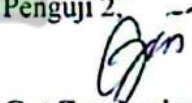
NIP. 199007212020121016

Penguji I,


Zakki Fuadi Khalil, S.IP., M.Si

NIP. 199011192022031001

Penguji 2,


Cut Zamharira, S.IP., M.A.P

NIP. 197911172023212012

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Husein Mulia, M.Ag
NIP. 197803271999031005

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Peran Pemerintah Gampong Krueng Kalee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan ekonomi serta terbatasnya akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi di tingkat gampong. Pemerintah gampong memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk melalui program pemberdayaan ekonomi perempuan. Gampong Krueng Kalee masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses sumber daya ekonomi, seperti modal usaha, pelatihan, dan pengembangan keterampilan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian perempuan belum mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan berkontribusi secara optimal terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga. Meskipun Pemerintah Gampong telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan ekonomi, pelaksanaan program tersebut masih memerlukan kajian mengenai peran pemerintah, efektivitas pelaksanaan, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pemberdayaan ekonomi perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Gampong Krueng Kalee dalam pemberdayaan ekonomi perempuan serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Gampong Krueng Kalee telah menjalankan perannya dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui berbagai program seperti pelatihan keterampilan, dukungan terhadap kelompok usaha perempuan, serta pemberian akses terhadap kegiatan ekonomi produktif. Peran pemerintah terlihat melalui indikator expectation, norm, performance, dan evaluation dalam pelaksanaan program pemberdayaan. Faktor pendukung pemberdayaan ekonomi perempuan meliputi dukungan pemerintah gampong, partisipasi masyarakat, serta adanya kelompok usaha perempuan. Sementara itu, faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, rendahnya keterampilan sebagian perempuan, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Gampong, Pemberdayaan Ekonomi, Perempuan.

KATA PENGANTAR

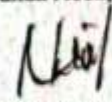
Alhamdulillah, segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan bagi peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"Peran Pemerintah Gampong Krueng Kalee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan"**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mendapat bimbingan, motivasi dan bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. MujiMulia, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UINAr-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara.
4. Zakki Fuadi Khalil, S.IP., M.Si. Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara.
5. Dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Serta yang teristimewa, terima kasih setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, membina, serta selalu menyertakan penulis dengan do'a dan kepada Seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah mereka berikan. Hanya kepada Allah SWT penulis serahkan, semoga semua kebaikan mereka mendapat balasan pahala terbaik darinya. Selanjutnya, penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu, segala kritikan dan saran yang berguna untuk proses penyempurnaan proposal ini sangat penulis harapkan. Demikian semoga proposal skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 01 Juli 2026


Nailul Aulfa
NIM. 190802105

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Penjelasan Istilah	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
2.1 Peran	10
2.2 Pemerintah Gampong	15
2.3 Konsep Pemberdayaan Ekonomi.....	19
2.4 Perempuan	24
2.5 Penelitian Terdahulu.....	28
2.6 Kerangka Pemikiran	32
 BAB III METODE PENELITIAN	 34
3.1 Jenis Penelitian	34
3.2 Fokus Penelitian	35
3.3 Lokasi Penelitian	34
3.4 Sumber Data	35
3.5 Informan Penelitian	36
3.6 Teknik Pengumpulan Data	36
3.7 Teknik Analisis Data	38
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 41
4.1 Gambaran Umum Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar.....	41
4.2 Pembahasan Penelitian	53

BAB V PENUTUP	73
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	78



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informasi Penelitian	37
Tabel 4.1 Penelusuran Sejarah Keusyik Gampong	42
Tabel 4.2 Program-Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pengurus PKK Gampong Krueng Kale.....	50
--	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	78
Lampiran 2 Dokumentasi Kegiatan	79
Lampiran 3 Surat Pengantar Pembimbing Skripsi	82
Lampiran 4 Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa.....	83
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	84



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pemerintah dibentuk untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana seharusnya laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam bidang pembangunan. Faktanya, banyak perempuan yang masih termarginalkan dan selalu identik dengan peran domestik, seperti mengurus rumah tangga.¹ Sementara itu, berdasarkan data proyeksi pertumbuhan penduduk pada tahun 2020 diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia mencapai 270 juta jiwa, dan 134 juta jiwa di antaranya merupakan perempuan. Tetapi, selama ini perempuan kurang dilibatkan dalam pembangunan negara karena adanya diskriminasi gender yang membuat perempuan termarginalkan dalam ketenagakerjaan, sehingga menyudutkan perempuan dalam mencari pekerjaan.²

Perempuan sering mengalami masalah dan lebih rentan terhadap gejala ketidakstabilan pada ranah publik, sehingga muncul suatu gagasan pembelaan, yaitu: pembebasan atau pemberdayaan. Hal ini melahirkan gerakan pemberdayaan

¹ Mochammad Rozikin, "Analisis Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Batu". *Jurnal Review Politik*, 2012, 2 (2): 219-243.

² Ulfatun Hasanah & Najahan Musyafak, "Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik". *Jurnal Studi Gender*, 2018, Vol. 12 No. 03: 409-432.

perempuan sebagai antiklimaks dari gagasan pemberdayaan Masyarakat.³ Program pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memperbaiki situasi dan kondisinya agar berdaya dan mencapai kemandirian dalam pembangunan, sehingga masyarakat menjadi sadar akan peran dan posisinya dalam membangun masyarakat sejahtera. Proses pemberdayaan penting dalam pembangunan berkelanjutan suatu negara yang mengharapkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan struktur ekonomi.⁴

Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, pemerintahan, negara dan tata dunia dalam proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab untuk mewujudkan kehidupan, politik, hukum dan pendidikan. Pemberdayaan mengandung tiga kekuatan, yaitu: kekuatan untuk berbuat, kekuatan untuk membangun kerjasama dan kekuatan dalam diri pribadi manusia.⁵ Pemberdayaan (*empowerment*) mengacu pada pengaktualisasian potensi masyarakat kelompok lemah yang tidak memiliki daya, kekuatan, kemampuan dalam mengakses sumber daya produktif, atau masyarakat yang termarginalkan dalam pembangunan, ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan sosial dan ketidakberdayaan.⁶ Berdasarkan beberapa deskripsi di atas, pemberdayaan pada dasarnya harus lebih difokuskan pada perempuan yang mengalami marginalisasi. Dengan adanya program pemberdayaan perempuan,

³ Murniati Ruslan, "Pemberdayaan Perempuan dalam Dimensi Pembangunan Berbasis Gender", *Musawa: Journal for Gender Studies*. Vol. 2, No. 1, Juni 2010, h.79-96.

⁴ Oos Muhammad Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 4.

⁵ Husein Umar, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), h. 3

⁶ Kurniawati, "Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi: Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto". *Jurnal Administrasi Publik*, 2013, 1 (4): 9-14.

maka akan terwujudnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan, sehingga perempuan juga dapat membangun perekonomian demi mencapai kesejahteraan keluarga.⁷ Berikut beberapa program pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk memberdayakan perempuan di desa, antara lain:⁸

1. Memberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan desa dalam berbagai bidang, seperti kewirausahaan, manajemen keuangan, pertanian, dan kesehatan.
2. Meningkatkan akses perempuan desa terhadap sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, seperti modal usaha, lahan pertanian, air bersih, dan layanan kesehatan.
3. Pembentukan kelompok-kelompok perempuan untuk memperkuat jaringan sosial, meningkatkan kapasitas, dan mempromosikan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
4. Mendorong partisipasi perempuan desa dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan desa, seperti partisipasi dalam rapat-rapat desa dan pembentukan lembaga desa.
5. Meningkatkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender dalam segala aspek kehidupan.

⁷ Suriani Nur, "Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan dan Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup". *AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 2019, 10 (1): 99-111.

⁸ Rudi, (2023), "Sistem Informasi Desa Sejiram: Pelatihan Pemberdayaan Perempuan", <https://desasejiram.id/artikel/2023/3/16/pelatihan-pemberdayaan-perempuan> diakses pada tanggal 14 Mei 2024.

Pemberdayaan perempuan dianggap sebagai proses penyadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar dalam keluasaan, pengawasan, pengambilan keputusan dan tindak transformasi yang mengarah pada perwujudan persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki.⁹ Selain itu, program-program pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat selama ini merupakan upaya agar terdistribusinya manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan secara seimbang.¹⁰

Kebijakan terkait pemberdayaan perempuan di Indonesia ditujukan guna pemenuhan kebutuhan strategis dan praktis perempuan, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Perempuan bahwa perempuan memiliki potensi yang besar dalam berbagai bidang baik bidang sosial, ekonomi, politik, dan pendidikan tanpa mengesampingkan peran utamanya dalam mengelola keluarga. Perempuan diharapkan memiliki keahlian dalam berbagai bidang guna meningkatkan kondisi ekonomi keluarga.¹¹

Faktanya, sebagian perempuan Aceh masih mengalami kesulitan dalam mengisi perubahan konstruksi sosial karena bio-sosial di Aceh melahirkan strata sosial, dimana perempuan dianggap sebagai makhluk inferior dan tersubordinat di atas kepentingan laki-laki. Perempuan juga tidak dilibatkan dalam rapat desa dan keputusan rapat selalu berdasarkan pada perpektif dan logika maskulin. Selain itu,

⁹ A. Syafi'i Ma'arif, (2003). *Pembangunan dalam Perspektif Gender*. Malang:UMM Press.

¹⁰ S. Marwanti, & I. D. Astuti, "Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar". *Sepa*, 2012, 9(1): 134-144.

perempuan tidak dipersiapkan dalam rangka penguasaan kemandirian ekonomi dan pengetahuan karena secara penuh penguasaan terhadap ruang publik dikuasai laki-laki secara terus-menerus, sehingga menyebabkan terhimpitnya akses bagi Perempuan.¹¹ Meskipun demikian, belakangan masyarakat mulai membuka diri terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, seperti program pemberdayaan perempuan melalui program BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) yang dilakukan oleh BUMG Lamkeuneung melalui pengadaan program kios online, menjahit seprai dan sulam gayo, perlengkapan pelaminan dan peternakan.¹² Selain itu, program pemberdayaan perempuan juga dilakukan di kecamatan Syiah Kuala dengan memanfaatkan alokasi dana desa, seperti program pelatihan, sosialisasi, dan program padat karya tunai yang dilaksanakan di desa Tibang. Beberapa program pemberdayaan perempuan juga dilakukan di desa Lamgugob, yaitu pelatihan tenun, bantuan modal, pelatihan tanaman hidroponik, pembuatan sabun cair, merangkai sirih, dan bantuan sembako untuk warga yang kurang mampu.¹³ Adapun pada observasi awal penelitian di gampong Krueng Kalee, terdapat suatu tempat untuk menenun kain khas Aceh yang dikelola oleh 10 orang Perempuan.¹⁴

Pemberdayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengadaan program-program pelatihan dan pemberian akses terhadap sumberdaya *gampong*

¹¹ Bachtiar, *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UUD* (Jakarta: Swadaya Grup, 2015), h. 199

¹² Iskandar, "Gender dan Problematisasi Ekonomi Perempuan Aceh". *Saree: Research in Gender Studies*, 2022, 4 (2): 123-125.

¹³ Fitria Mustika. (2019). "Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Badan Usaha Milik Gampong (BUMG): Studi di Gampong Lamkuneung Aceh Besar". *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, h. 73.

¹⁴ Gusmeri, dkk. (2019). *Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, h. 43.

dalam rangka memberdayakan ekonomi perempuan *gampong* Krueng Kalee agar dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Berdasarkan data Sistem Informasi Gampong (SIGAP) Krueng Kalee, jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, yaitu 57% (192 jiwa) banding 43% (143 jiwa), di antaranya: 75% laki-laki berprofesi sebagai petani, 7% sebagai pelaku wiraswasta, 4% bekerja sebagai Polri/PNS, 2% bekerja sebagai karyawan BUMN, dan 12% lainnya bekerja serabutan. Sementara sebagian besar perempuan menjadi buruh tani membantu keluarganya. Selain itu, terdapat sebuah kelompok penenun yang terdiri dari 10 orang dan diharapkan kelompok ini terus berkembang seiring waktu agar semakin banyak perempuan yang berdaya secara finansial. Dengan adanya pemberdayaan ekonomi perempuan diharapkan perempuan lebih produktif sehingga mampu meningkatkan ekonomi masyarakat *Gampong* Krueng Kalee. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian terkait **“Peran Pemerintah *Gampong* Krueng Kalee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah *Gampong* Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dalam pemberdayaan ekonomi perempuan?
2. Faktor pendukung dan penghambat Pemerintah *Gampong* Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dalam pemberdayaan ekonomi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Pemerintah *Gampong Krueng Kalee* Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pemerintah *Gampong Krueng Kalee* Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar dalam pemberdayaan ekonomi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat informasi akademis dan bahan bacaan bagi para peneliti lanjutan terkait dengan peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di pedesaan. Dengan adanya peran pemerintah yang optimal, diharapkan perekonomian masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Pemerintah dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi kinerja dalam bidang pemberdayaan dan mendapatkan pengetahuan baru dalam memberdayakan perekonomian masyarakat.
- b. Masyarakat dapat menjadikan penelitian ini sebagai acuan dalam memberikan masukan bagi pemerintah agar memperhatikan pentingnya pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat, khususnya perempuan yang menjadi kepala keluarga.

- c. Peneliti dapat menjadikan penelitian ini sebagai pengalaman terkait bentuk-bentuk pemberdayaan yang diimplementasikan oleh pemerintah.

1.1 Penjelasan Istilah

Adapun penjelasan istilah-istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Peran

Peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan wewenangnya sesuai dengan kedudukannya untuk menentukan apa yang harus diperbuat bagi masyarakat dan kesempatan-kesempatan apa yang harus diberikan masyarakat kepadanya.

1.5.2 Pemerintah Gampong

Pemerintah Desa atau *Gampong* merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa yang dipimpin oleh kepala desa (*Keuchik*) yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

1.5.4 Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi adalah usaha yang dilakukan untuk mengubah kondisi masyarakat tertentu dalam memecahkan berbagai persoalan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan dengan mewujudkan yang kuat, *modern*, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar.

1.5.4 Perempuan

Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminim. Perempuan adalah wanita yang mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat khas kewanitaan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peran

2.1.1 Definisi Peran

Teori peran merupakan perpaduan dari berbagai teori, orientasi, dan disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater, dimana seorang aktor harus memerankan seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh tersebut diharapkan berperilaku atau berperan secara tertentu.¹⁵ Peran didefinisikan sebagai aspek dinamis kedudukan (status), dimana seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dianggap telah menjalankan suatu peranan. Status adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang bila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, maka dianggap menjalankan suatu fungsi.¹⁶

Peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dari seseorang/lembaga yang memiliki kedudukan dalam masyarakat untuk melakukan peranannya, yaitu tindakan yang diambil dalam suatu peristiwa.¹⁷ Tindakan tersebut pada umumnya diatur dalam suatu ketentuan yang menjadi fungsi dari seseorang/lembaga. Peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku karena peran memiliki fungsi berikut:

¹⁵ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), 25.

¹⁶ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h. 212.

¹⁷ Syamsir Torang, *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 86.

- (1) Memberi arah pada proses sosialisasi;
- (2) Mewarisi tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma dan pengetahuan;
- (3) Mempersatukan kelompok atau masyarakat; dan
- (4) Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol agar dapat melestarikan kehidupan Masyarakat.¹⁸

Peran diartikan sebagai fungsi atau tingkah laku yang sepatutnya ada pada individu sebagai satu aktifitas, yang dikelompokkan menjadi peran publik dan peran domestik. Peran publik adalah aktivitas yang dilakukan di luar rumah dengan tujuan mendatangkan penghasilan. Peran domestik adalah aktivitas yang dilakukan di rumah dan tidak bertujuan menghasilkan penghasilan. Peran ini biasanya dilakukan oleh ibu rumah tangga dengan harapan agar kondisi keluarga menjadi sejahtera dari segi pemenuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan.²³

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah perilaku-perilaku yang sepatutnya dimiliki oleh seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu dalam masyarakat guna memenuhi tugas serta kewajiban sebagai pemegang wewenang. Jika dihubungkan dengan peran pemerintah dalam pemberdayaan perempuan, maka merupakan tugas dan wewenang pemerintah dalam meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan.

¹⁸ J. Dwi Narkowo, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), h.160.

2.1.2 Jenis-Jenis Peran

Peran atau *role* dikelompokkan memiliki beberapa bagian, yaitu:¹⁹

1. Peranan nyata (*Anacted Role*), yaitu suatu tindakan dan perilaku yang benar-benar dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*), yaitu peran yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang memiliki wewenang dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflick*), yaitu suatu kondisi yang dialami seorang yang menduduki suatu status yang dituntut untuk memenuhi harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*), yaitu pelaksanaan peran emosional.
5. Kegagalan peran (*Role Failure*), yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya dicontoh, tiru, dan diikuti.
7. Model peranan (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya dicontoh, tiru, dan diikuti.
8. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*), yaitu hubungan antara seseorang dan individu lainnya ketika sedang menjalankan perannya.

¹⁹ Halda Arsyad, *Kajian Pembangunan Manusia Berbasis Gender*, (Yogyakarta: CV. Istana Agency, 2020), h. 15.

9. Ketegangan peranan (*Role Strain*), yaitu kondisi yang timbul ketika seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang diharapkan akibat ketidakserasian yang bertentangan.

Selain itu, peran juga dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis berikut:²⁰

1. Peran aktif, yaitu peran seseorang yang seutuhnya aktif dalam setiap tindakan dalam suatu organisasi atau lembaga yang diukur berdasarkan kehadiran dan kontribusinya dalam organisasi tersebut.
2. Peran partisipasif, yaitu peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kebutuhan atau waktu tertentu saja.

Peran pasif, yaitu peran yang tidak dilakukan atau dilaksanakan oleh seseorang, melainkan hanya sebagai simbol pada kondisi tertentu dalam kehidupan masyarakat.

Dari berbagai jenis-jenis peran di atas, peneliti menggunakan jenis peran nyata (*anacted role*) yaitu peran yang benar-benar dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran. Dalam hal ini yang dikaji adalah peran nyata pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

2.2.3 Dimensi Peran

Terdapat lima indikator perilaku yang erat kaitannya dengan peran, antara lain:²¹

²⁰ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012), h. 214.

1. Harapan tentang peran (*expectation*), yaitu harapan-harapan orang lain tentang perilaku yang pantas, yang seharusnya ditunjukkan oleh seseorang yang memiliki peran tertentu. Harapan tentang perilaku dapat berlaku umum, harapan dari segolongan orang saja, dan/atau harapan dari satu orang tertentu.
2. Norma (*norm*), yaitu salah satu bentuk harapan. Menurut Secord dan Backman jenis- jenis harapan dapat dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. Harapan yang diantisipasi (*anticipatory*), yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi.
 - b. Harapan normatif (*prescribed role expectation*), yaitu keharusan yang menyertai suatu peran. Harapan normatif dikategorikan menjadi dua jenis berikut:
 - (1) Harapan terselubung (*covert*), merupakan harapan yang tetap ada tanpa harus diucapkan dan kemudian dianggap sebagai norma, seperti dokter berperan menyembuhkan pasien dan guru berperan mendidik peserta didik.
 - (2) Harapan yang terbuka (*overt*), merupakan harapan yang diucapkan dan dianggap sebagai tuntutan peran (*role demand*), seperti ayah meminta anaknya untuk orang yang rajin belajar dan bertanggungjawab. Tuntutan peran melalui proses internalisasi dapat menjadi norma bagi peran yang bersangkutan.

²¹ Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 217-220

3. Wujud perilaku dalam peran (*performance*), yaitu peran yang diwujudkan dalam perilaku nyata dan bervariasi, bukan hanya harapan. Variasi tersebut dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya, sehingga wujud perilaku peran dapat digolongkan ke dalam berbagai jenis hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencari nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan sebagainya.
4. Penilaian (*evaluation*) dan sanksi (*sanction*), dimana penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan masyarakat tentang norma. Penilaian peran yaitu kesan positif atau negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan norma dan didasarkan pada harapan masyarakat terhadap peran tersebut. Sanksi dianggap sebagai usaha yang dilakukan untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif menjadi positif.

2.2 Pemerintah

Pemerintah adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa badan yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan dan mengatur kelangsungan hidup suatu negara, atau sekumpulan orang yang diberi kekuasaan yang terbatas untuk memikul tanggung jawab secara Bersama.²² Pemerintah dianggap sebagai sebuah organisasi yang memiliki:²³

- (1) Otoritas memerintah dari sebuah unit politik;

²² Peter Salim. Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: modern English Press, 2002), h. 1140.

²³ Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 61.

- (2) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (*political*);
- (3) Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan;
- (4) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan, untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan badan publik yang memiliki otoritas dan wewenang dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam penyediaan layanan publik dan sipil guna memproses pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga dapat mengatur masyarakat dengan menjalankan kekuasaan.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh disebutkan bahwa *gampong* adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh *keuchik* dalam menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Pemerintahan *gampong* terdiri atas *keuchik* dan badan permusyawaratan *gampong* yang disebut *tuha peuet* atau nama lain. Pemilihan *keuchik* dilakukan secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 5 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Dalam melaksanakan tugasnya *keuchik* dibantu perangkat *gampong*, yaitu sekretaris *gampong* dan perangkat *gampong* lainnya. Sekretaris *gampong* diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan

sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris *gampong* dan perangkat *gampong* lainnya bertanggung jawab kepada *keuchik*.²⁴

2.2.1 Fungsi Pemerintah Gampong

Secara umum, pemerintah memiliki dua fungsi pemerintahan sebagai berikut:²⁵

1. Fungsi primer, yaitu fungsi yang terus menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Semakin berdaya kelompok yang diperintah, semakin meningkat fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai penyedia jasa publik yang tidak diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil termasuk layanan birokrasi.
2. Fungsi sekunder, yaitu fungsi yang berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Semakin berdaya yang diperintah, semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Pemerintah berfungsi sekunder sebagai penyedia kebutuhan dan tuntutan yang diperintah.

Sementara itu, dalam sistem pemerintahan gampong, seorang *keuchik* memiliki fungsi untuk menjalankan tugas dan kewajiban berikut:²⁶

- (1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- (2) Membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari'at Islam warga;

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, h. 80-81.

²⁵ Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003) h. 71

²⁶ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

- (3) Menjaga dan memelihara kelestarian adat dan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- (4) Membina dan memajukan perekonomian masyarakat serta memelihara kelestarian lingkungan hidup;
- (5) Memelihara ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
- (6) Menjadi Hakim perdamaian antar penduduk dalam Gampong;
- (7) Mengajukan Rancangan Reusam Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Reusam Gampong;
- (8) Mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Gampong kepada Tuha Peuet Gampong untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Gampong;
- (9) Keuchik mewakili Gampongnya di dalam dan di luar Pengadilan dan berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya.
- (10) Keuchik sebagai hakim perdamaian dibantu oleh Imelum Meunasah dan Tuha Peuet Gampong, jika terdapat pihak yang keberatan terhadap keputusan tersebut dapat meneruskannya kepada Imelum Mukim dan keputusan Imelum Mukim bersifat akhir dan mengikat.

Berdasarkan, uraian di atas dapat diketahui bahwa keuchik memiliki kewajiban dalam membina dan memajukan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, salah satu tugas dan fungsi pelayanan lebih ditekankan pada upaya mendahulukan kepentingan umum, memudahkan urusan publik, mempersingkat

waktu proses pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan publik. Tugas pokok dapat diringkas menjadi tiga fungsi, yaitu: (1) Pelayanan (*service*) yang menciptakan keadilan dalam masyarakat, (2) Pemberdayaan (*empowerment*) yang mendorong kemandirian masyarakat, dan (3) Pembangunan (*development*) yang menghasilkan kemakmuran masyarakat.²⁷

Dalam menjalankan fungsi pemberdayaan, istilah pemberdayaan ditinjau dalam arti *empowering* dan *enabling*. *Empowering* adalah pemberian hak atau kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi atau menentukan masa depan. *Enabling* yaitu proses belajar untuk meningkatkan *ability*, *capacity* dan *capability* masyarakat dalam melakukan sesuatu demi membantu diri sendiri serta memberi sumbangan sebesar mungkin bagi integritas nasional.²⁸

2.3 Konsep Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” atau “berdaya” yang berarti kekuatan atau memiliki kekuatan. Pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang berarti (kekuasaan atau keberdayaan).²⁹ *Empowerment* didefinisikan sebagai pemberian daya atau kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian atau sandang, rumah atau papan, pendidikan, Kesehatan.³⁰

²⁷ Riyaas Rasyid, *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan* (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widia, 2002), h. 59.

²⁸ Taliziduhu Ndraha, *Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD, 2000), h. 78.

²⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerja Sosial* (Bandung: PT. Ravika Adimatama, 2014), h. 57.

³⁰ Fauziah Fitri Hernanto Dkk, *Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19*, (Malang: Rena Cipta Mandiri), h.84.

Pemberdayaan adalah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan.³¹ Pemberdayaan juga didefinisikan sebagai proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses, yaitu serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan dan keberdayaan kelompok masyarakat yang lemah dan menghadapi masalah kemiskinan. Pemberdayaan sebagai tujuan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial menjadi masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan, pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup.³²

Pemberdayaan merupakan proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses belajar bersama yang partisipatif agar terjadi perubahan perilaku pada diri *stake holders* yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin berdaya, mandiri, partisipatif, dan sejatara secara berkelanjutan.³³ Pemberdayaan ekonomi dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran masyarakat supaya mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga akan mendorong percepatan perubahan struktur ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Pemberdayaan ekonomi dilakukan melalui penguatan dalam pemilikan faktor-faktor produksi, penguasaan distribusi

³¹ Azis Muslim, *Metodologi Pengembangan Masyarakat* (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 3.

³² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 60.

³³ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 100.

dan pemasaran, serta penguasaan pengetahuan dan keterampilan dalam berbagai aspek, sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat agar memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pemberdayaan ekonomi dapat dilakukan dengan memberikan dukungan berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kesadaran dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya untuk kemajuan ekonomi.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan, terdapat empat prinsip yang sering digunakan yaitu:³⁵

1. Prinsip kesetaraan, yaitu kesetaraan kedudukan antara masyarakat dan lembaga yang melakukan program pemberdayaan dalam mengembangkan mekanisme berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian agar terjadi proses pembelajaran.
2. Prinsip partisipasi, program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat serta didampingi oleh pendamping yang berkomitmen pada pemberdayaan masyarakat.

³⁴ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerja Sosial* (Bandung: PT. Ravika Adimatama, 2014), h. 59

³⁵ Sri Najiati, Agus Asmana, dan I Nyoma N. Suryadinata, *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut* (Bogor: Wetlands International, 2005), h.54.

3. Prinsip keswadayaan atau kemandirian, yaitu menghargai kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain dengan tidak memandang orang yang tidak mampu sebagai obyek yang tidak memiliki kemampuan, melainkan sebagai subyek yang memiliki kemampuan sedikit.
4. Prinsip berkelanjutan, program pemberdayaan dirancang berkelanjutan, dimana pada awalnya pendamping lebih dominan dibandingkan dengan masyarakat, tetapi secara perlahan peran pendamping akan semakin berkurang karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatan sendiri.

Selain itu, pemberdayaan yang dilakukan memiliki tujuan utama untuk memperkuat kekuasaan masyarakat terutama kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan karena kondisi internal (persepsi sendiri) dan kondisi eksternal (penindasan oleh struktur sosial yang tidak adil).³⁶ Pada dasarnya, tujuan dilakukan pemberdayaan masyarakat, yaitu:³⁷

1. Menciptakan manusia yang otentik dan integral dari golongan lemah, miskin, terpinggir, kelompok-kelompok kecil seperti petani, kaum miskin, dan kelompok perempuan yang tertindas atau terpinggir.
2. Memberdayakan kelompok masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi agar lebih mandiri dan mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, serta mengambil bagian dalam pembangunan masyarakat.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), h. 75.

³⁷ I Nyoman Sumaryadi, *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Citra Utama, 2005), h. 115.

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahap pemberdayaan, yaitu:³⁸

1. Tahap Persiapan, yang meliputi: (1) Penyimpanan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh *community worker*, dan (2) penyiapan lapangan yang diusahakan dilakukan secara non-direktif.
2. Tahapan pengkajian (*assessment*), dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok masyarakat dimana petugas harus mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan (*feel needs*) dan sumber daya.
3. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, petugas sebagai agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif melibatkan warga dalam memberikan ide terkait masalah yang dihadapi dan cara mengatasinya.
4. Tahap perumusan rencana aksi, agen perubahan membantu tiap kelompok merumuskan dan menentukan program/kegiatan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Petugas juga membantu merumuskan gagasan tiap kelompok dalam bentuk proposal kepada penyedia dana.
5. Tahap pelaksanaan (*implementasi*) program atau kegiatan, dalam hal ini masyarakat sebagai kader diharapkan menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan.
6. Tahap evaluasi, proses evaluasi terhadap warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya melibatkan warga guna membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan internal dan membangun komunikasi masyarakat.

³⁸ Agus Ahmad Syafi'i, *Manajemen Masyarakat Islam* (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru, 2001), h. 63.

7. Tahap terminasi, yaitu pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran dengan harapan proyek harus segera dihentikan.

Selain itu, keberhasilan suatu proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal harus diwujudkan melalui langkah-langkah berikut, yaitu: (1) Setiap warga belajar dipersiapkan untuk memiliki tingkat kepekaan yang tinggi terhadap perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang terjadi; (2) Warga belajar dipersiapkan atau diberikan berbagai macam keterampilan sesuai dengan kebutuhan dan masalah yang mereka hadapi, dan (3) Warga belajar dibina untuk secara konsisten lebih suka bekerja sama dalam menangani suatu masalah.³⁹

2.4 Perempuan

Gender atau jenis kelamin merupakan perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dari aspek nilai dan tingkah laku. Gender dianggap sebagai suatu konsep kultural yang menjelaskan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional yang berkembang dalam masyarakat.⁴⁰ Secara epistemologi, perempuan berasal dari kata per-empu-an “ahli/mampu”, perempuan merupakan seorang yang mampu melakukan sesuatu. Secara ontologi, perempuan adalah makhluk Tuhan yang secara alamiah memiliki organ reproduksi berupa vagina, payudara, kelenjar susu, rahim dan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan serta menyusui.

Perempuan dipersepsikan sebagai manusia yang memiliki kelemahan, keterbatasan, selalu menggunakan perasaan, dan tidak logis, sehingga dianggap

³⁹ Mustofa Kamil, *Pendidikan Nonformal* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 58.

⁴⁰ Nassaruddin Umar, *Argumen Kesenjangan Gender* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), h. 30.

tidak layak bekerja di sektor publik yang dianggap keras, kompetitif, dan rasional. Perempuan yang bekerja di publik, membangun karir, dan berkompetisi dengan laki-laki dianggap menyalahi kodrat. Sejumlah permasalahan serius seperti kekerasan beban ganda, marjinalisasi, subordinasi, dan stereotip sering dialami perempuan.⁴¹

Perempuan diposisikan pada peran yang pasif dan tidak berdaya serta hanya sebagai “pelengkap” kaum laki-laki karena perempuan diarahkan menjadi pemelihara yang sabar, pasif, menjadi pesakitan, kurang standar, tidak diharapkan menonjolkan diri, dan boleh memiliki profesi tetapi kurang diakui peranannya.⁴²

Faktanya, perempuan memiliki kecakapan untuk menerima hak-haknya dan mampu berpartisipasi dalam kebangunan masyarakat. Meskipun perempuan secara filsafah adalah makhluk humanis, tetapi tidak berarti lemah untuk melakukan sesuatu yang sulit.⁴³ Perempuan menurut anggapan masyarakat luas bertanggungjawab dalam mengelola rumah tangga sehingga menanggung beban kerja domestik lebih banyak dibanding laki-laki. Manifestasi ketidakadilan gender telah mengakar dan mendorong munculnya aliran feminisme, yang menginginkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dari segala aspek kehidupan.⁴⁴

⁴¹ Lusya Palulungan., M. Ghufan H. Kordi K., Muhammad Taufan Ramli. *Perempuan, Masyarakat Patriarki dan Kesetaraan Gender* (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia, 2020), h. 4-5.

⁴² Mahmud, Heri Gunawan, dan Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga* (Jakarta: Akademia Permata, 2013), h. 165

⁴³ Anshori. dkk. *Tafsir Tematik Isu-Isu Kontemporer Perempuan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Peresda, 2014) h. 62.

⁴⁴ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamannya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka. Pelajar, 2011), h. 23.

2.4.1 Peran Perempuan

Persoalan posisi dan peranan perempuan menjadi pembahasan penting seiring dengan adanya opini ketidakadilan dan ketertindasan perempuan. Analisis peranan perempuan pada dasarnya dititikberatkan pada tiga hal, yaitu:

1. Pola integrasi perempuan dalam hal produksi (nafkah) yang langsung menghasilkan;
2. Pola integrasi perempuan dalam hal pekerjaan produktif yang tidak langsung menghasilkan, seringkali tercakup dalam proses reproduksi;
3. Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan Keputusan.⁴⁵

Peranan perempuan dalam hal produksi dilihat dari keterlibatan perempuan dalam semua pekerjaan produksi yang ada dalam masyarakat, jangkauan perempuan terhadap ragam pekerjaan, waktu yang dicurahkan dengan imbalan tertentu, pengeluaran rumah tangga, dan tingkat pendapatan.⁴⁶

Selain itu, analisis peran perempuan dapat dilakukan dari perspektif posisi mereka dalam pekerjaan produktif tidak langsung (domestik) dan pekerjaan produktif langsung (publik), yaitu sebagai berikut:

1. Peran Tradisi, menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi (mengurus rumah tangga, melahirkan, mengasuh anak, serta mengayomi suami). Hidupnya 100% untuk keluarga. Pembagian kerja sangat jelas, yaitu perempuan di rumah dan lelaki di luar rumah.

⁴⁵ Masturin, "Peranan Perempuan dalam Masyarakat Islam di Era Post Modernisasi Pendekatan Tafsir Tematik", *Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, 15 (2), November 2015, h. 351.

⁴⁶ Pudjiwati Sajogyo, *Peranan Wanita dalam Perkembangan Masyarakat Desa* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), h. 305-307.

2. Peran transisi mempolakan peran tradisi lebih utama dari peran yang lain. Pembagian tugas mengikuti aspirasi gender, eksistensi mempertahankan keharmonisan dan urusan rumahtangga tetap tanggungjawab perempuan.
3. Dwiperan memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia, yaitu menempatkan peran domestik dan publik dalam posisi sama penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran, atau keengganan suami akan memicu keresahan atau menimbulkan konflik terbuka atau terpendam.
4. Peran egalitarian menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar. Dukungan moral dan tingkat kepedulian lelaki dapat menghindari konflik kepentingan pemilahan dan pendistribusian peranan. Jika tidak, akan terjadi argumentasi untuk mencari pembenaran atau menumbuhkan ketidaknyamanan suasana kehidupan berkeluarga.
5. Peran kontemporer adalah dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. Jumlahnya belum banyak.⁴⁷

Peran perempuan merupakan perilaku maupun kewajiban yang harus dilakukan oleh perempuan sebagai kewajiban kodrati. Peran perempuan sesuai kodratnya yaitu ibu rumah tangga yang baik untuk suami dan anak-anak. Lalu perempuan memasuki ranah publik sebagai pekerja menimbulkan peran ganda dalam keluarga.⁴⁸ Peran ganda perempuan dapat dilakukan sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁷ Aida Vitayala S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa* (Bogor: IPB Press, 2010), 145.

⁴⁸ Alifulahtin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir* (Malang: UB Press, 2017), h. 101.

⁴⁹ St. Maryam, *Dinamika Sosial Ekonomi Partisipasi Kerja Perempuan Menikah*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), h. 5-6.

2.3 Sebagai buruh (bidang industri) perempuan dituntut untuk memajukan perusahaan dengan menyumbangkan kreativitas dan kemampuan yang dimilikinya.

3.3 Sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu, perempuan sebagai pengelola yang bijaksana dalam keluarganya.

4.3 Sebagai anggota didalam masyarakat perempuan harus pandai bersosialisasi, menjaga sikap, serta menjaga diri dan nama baik keluarganya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terkait pemberdayaan ekonomi perempuan telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian tersebut berfungsi untuk membuat perbandingan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan serta memberi penguatan terhadap penelitian yang akan diteliti. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi peneliti, di antaranya:

Tabel 1 Penelitian Terdahulu⁵⁰

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dengan Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian
1.	Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Desa Lamamek,	Pemerintah desa telah berperan secara optimal dalam pemberdayaan perempuan melalui kebijakan, strategi, dan komunikasi.	Sama-sama membahas peran pemerintah dalam pemberdayaan perempuan serta faktor pendukung dan	Penelitian terdahulu berfokus pada peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan

⁵⁰ Zuhijjah Qurrotu Aini, "Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pencapaian Masalah Masyarakat Lokal Sekitar Wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul", *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018).

	Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh)	Pemerintah memberikan fasilitas, pendampingan, dan dukungan terhadap kegiatan PKK. Hambatan yang dihadapi meliputi rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya minat, serta rendahnya partisipasi perempuan dalam mengembangkan usaha.	penghambat pelaksanaan pemberdayaan.	secara umum, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada pemberdayaan ekonomi perempuan pada lokasi penelitian yang berbeda.
2.	Pemberdayaan Perempuan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil di Pedesaan (Studi dalam Kelompok Usaha Bersama Serang di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan)	Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui industri batik dan inovasi produk. Faktor pendukung berupa motivasi anggota, dukungan keluarga, dan pemerintah, sedangkan hambatannya adalah keterbatasan modal, bahan baku, dan pemasaran.	Sama-sama membahas pemberdayaan ekonomi perempuan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.	Penelitian terdahulu berfokus pada pemberdayaan melalui kelompok usaha bersama (KUB), sedangkan penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan dengan objek dan lokasi penelitian yang berbeda.
3.	Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pencapaian	Pemerintah telah memberikan dukungan berupa penyediaan lahan, pelatihan, dan bantuan modal sehingga meningkatkan	Sama-sama mengkaji peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan dampaknya	Penelitian terdahulu mengkaji pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata dengan

	Maşlahah Masyarakat Lokal Sekitar Wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul	pendapatan masyarakat. Namun, masih diperlukan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dipengaruhi oleh inisiatif masyarakat sendiri.	terhadap kesejahteraan.	pendekatan masalah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan dengan lokasi dan objek penelitian yang berbeda.
4.	Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Perempuan untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Pulau Kayu	Pemerintah berperan dalam pemberdayaan perempuan melalui pelatihan, sosialisasi, pendampingan, dan pengembangan program. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan dan kemampuan perempuan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mendorong partisipasi masyarakat agar program pemberdayaan dapat terus berjalan dan dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.	Sama-sama membahas peran pemerintah dalam pemberdayaan perempuan, khususnya dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, sama-sama melihat bentuk dukungan pemerintah serta faktor yang memengaruhi keberhasilan program pemberdayaan.	Penelitian terdahulu berfokus pada pemberdayaan perempuan di Desa Pulau Kayu, Kecamatan Susoh, Kabupaten Aceh Barat Daya melalui pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan. Sementara penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di lokasi penelitian yang berbeda serta mengkaji bentuk program, pelaksanaan, faktor pendukung dan

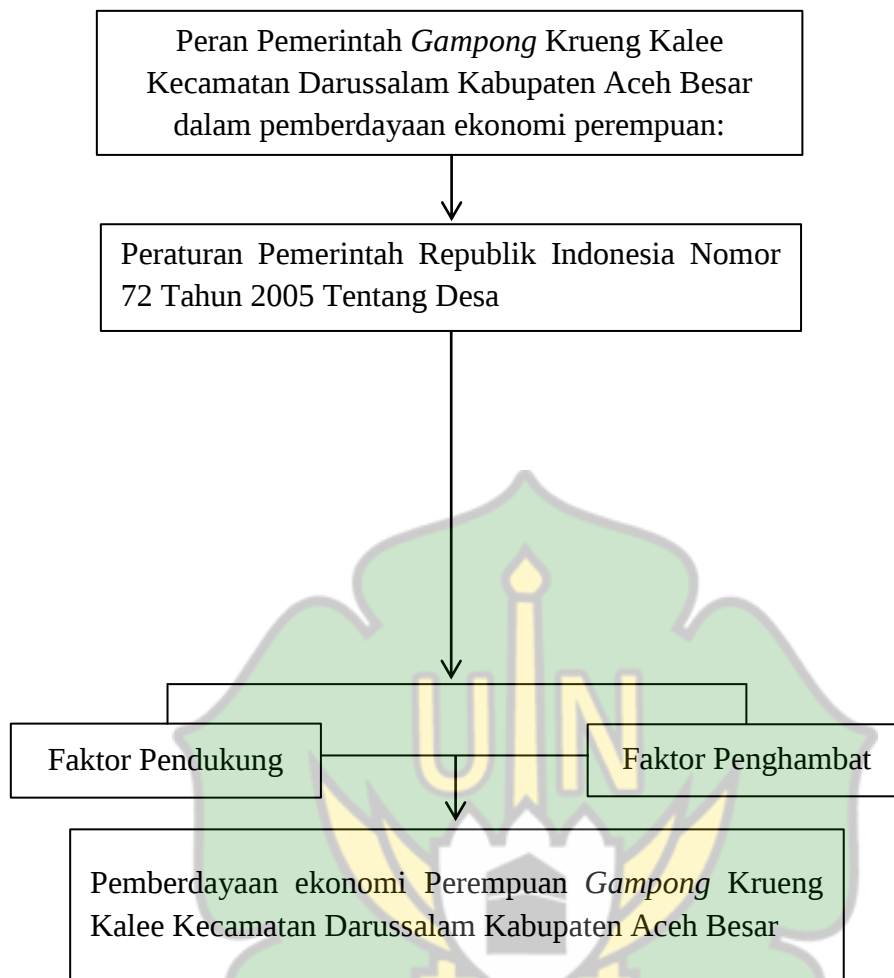
				penghambatnya.
5.	Dinamika Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Korban Kekerasan Rumah Tangga: Tindakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat	Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah menjalankan peran dalam pemberdayaan ekonomi perempuan korban KDRT. Namun, peran DP3AKB lebih banyak berfokus pada perlindungan perempuan, sedangkan pemberdayaan ekonomi masih dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga karena keterbatasan anggaran. Penelitian tersebut merekomendasikan adanya kebijakan dan program khusus agar perempuan korban KDRT dapat mencapai kemandirian ekonomi.	Sama-sama mengkaji peran pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi perempuan dan mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan. Penelitian juga sama-sama melihat pentingnya dukungan pemerintah dalam meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan.	Penelitian terdahulu secara khusus membahas perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan tindakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui DP3AKB. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan membahas pemberdayaan ekonomi perempuan secara lebih umum, dengan objek, karakteristik perempuan, dan lokasi penelitian yang berbeda.

2.6 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan inti dari kegiatan penelitian yang berisi dasar-dasar teoritis terkait masalah-masalah yang diteliti, disusun secara singkat untuk menjelaskan proses pelaksanaan penelitian.⁵¹ Kerangka konsep peran Pemerintah *Gampong* terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan di *Gampong Krueng Kalee* Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar seperti berikut:



⁵¹ John W. Creswell., & Plano Clark, *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (Thousand Oaks: Sage Publications, 2011), h. 266.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁵² Penelitian kualitatif bertujuan memahami berbagai fenomena manusia atau sosial melalui gambaran yang kompleks dan dijelaskan dengan kata-kata untuk melaporkan pandangan terinci dari informan yang dilakukan dalam latar alamiah.⁵³ Peneliti dianggap sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil kualitatif peneliti lebih ditekankan pada makna daripada generalisasi.⁵⁴

Diketahui bahwa kriteria data dalam penelitian kualitatif bersifat pasti, yaitu data sebenarnya dan tidak dibuat-buat. Sehingga, peneliti sebagai instrumen penelitian akan melakukan pengamatan secara langsung dan menuliskan hasil pengamatan nyata yang terjadi di lapangan. Pengamatan yang dilakukan terkait peran pemerintah dalam memberdayakan perempuan di *Gampong Krueng Kalee* Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 10.

⁵³ Warul Walidin, Saifullah, dan Tabrani, *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory* (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), h. 77.

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h. 4.

3.2 Fokus Penelitian

Adapun fokus yang dikaji dalam penelitian ini terkait peran Pemerintah *Gampong* Krueng Kalee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dalam penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai tugas, wewenang, kewajiban dan fungsi Kepala Desa (*Keuchik Gampong*) sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, antara lain:

1. Peran Pemerintah Desa (*Keuchik*) dalam penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi perempuan sesuai dengan indikator peran, yaitu:
 - a. *Expectation*
 - b. *Norm*
 - c. *Performance*
 - d. *Evaluation*
2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi *Keuchik Gampong* Krueng Kalee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dalam penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi perempuan

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, dan memudahkan akses peneliti dalam melakukan observasi. Penelitian ini dilakukan di *Gampong Krueng Kalee* Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber utama dengan beberapa pertimbangan untuk mengambil data primer, yaitu: cukup waktu dan dana untuk memperoleh data primer, dimana saja data primer tersebut dapat diperoleh, dan bagaimana cara memperoleh data tersebut.⁵⁵

3.4.2 Data Sekunder

Data yang bersumber dari hasil penelitian orang lain yang dapat berupa fakta, tabel, gambar, dan lain sebagainya.⁵⁶ Data sekunder diperoleh dari catatan, buku, majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori dan refensi tertulis bagi peneliti.⁵⁷

3.5 Informan Penelitian

Adapun beberapa orang yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini sebagai berikut.

⁵⁵ Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2007), h. 182.

⁵⁶ Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: PPM, 2007), h. 187.

⁵⁷ Wira Sujarweni, *Metodologi Penelitian; Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustakabaru Press, 2014), h. 74.

Tabel 3.1
Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Keterangan
1.	Keuchik	1 orang	Informan Utama
2.	Ketua PKK	1 orang	Informan Kunci
3.	Kepala Seksi Pemerintah	1 orang	Informan Kunci
4.	Tokoh Masyarakat	1 orang	Informan Kunci
5.	Tokoh Perempuan	3 orang	Informan Kunci
6.	Masyarakat	4 orang	Informan Kunci
Jumlah		9 orang	

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian yang bertujuan mengumpulkan data-data yang valid dari responden penelitian.⁵⁸ Untuk memperoleh data yang valid dan akurat, peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

3.6.1 Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan studi yang disengaja dan dilakukan secara sistematis, terencana, terarah dengan tujuan untuk mengamati dan mencatat fenomena atau perilaku obyek penelitian dengan memperhatikan syarat-syarat

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 224.

penelitian ilmiah agar hasil pengamatan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁹ Observasi adalah proses pengambilan data dalam penelitian dimana peneliti atau pengamat melihat situasi penelitian. Pengamatan sebagai alat pengumpul data ada kecenderungan terpengaruh oleh pengamat sehingga hasil pengamatan tidak obyektif.⁶⁰ Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati kondisi ekonomi perempuan di *Gampong Krueng Kalee* Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dan apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk memberdayakan ekonomi perempuan di tempat tersebut.

3.6.2 Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui proses tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta keterangan atau penjelasan, menilai jawaban-jawabannya, dan menggali keterangan lebih lanjut, agar dapat dikontruksikan makna dalam topik tertentu.⁶¹ Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang didasarkan pada laporan diri sendiri atau setidaknya memiliki pengetahuan dan keyakinan pribadi terkait topik yang ditanyai.⁶² Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan *Keuchik* (Kepala Desa) *Gampong Krueng Kalee* Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, perangkat desa, dan beberapa anggota masyarakat *gampong* tersebut.

⁵⁹ Warul Walidin, Saifullah, dan Tabrani, *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory* (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), h. 126.

⁶⁰ Wijaya Kusumah dan Dedi Dwitagama, *Mengenal Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: PT. Indeks Khasanah, 2011), h. 66-76.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 231.

⁶² Warul Walidin, Saifullah, dan Tabrani, *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory* (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015), h. 134.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan pengelompokan dan pemilahan data-data yang telah dikumpulkan untuk mencari data-data penting yang akan dikaji lebih dalam.⁶³ Berikut tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif:

3.7.1 Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data agar pengumpulan tersebut sistematis dan mudah, sehingga diperoleh data penting untuk menjawab permasalahan, mencari sesuatu yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan membuktikan hipotesis.

3.7.2 Reduksi Data

Reduksi data yaitu kegiatan merangkum dan memilih data-data penting untuk dikaji lebih lanjut agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya jika perlu.

3.7.3 Penyajian Data

Penyajian data membantu peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian yang umumnya dibuat dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya, untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.

3.7.4 Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada pengumpulan data

⁶³ Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* (Malang: Fakultas Syariah UIN, 2006), h. 59.

berikutnya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi juga dapat berubah dan berkembang setelah penelitian di lapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar

4.1.1 Sejarah Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar

Nama Krueng Kalee berasal dari bahasa Aceh, yaitu krueng yang berarti sungai dan kalee yang merujuk pada nama tempat. Secara geografis, penamaan ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut berada di sekitar aliran Sungai.⁶⁴ Gampong Krueng Kalee merupakan bagian dari wilayah Kemukiman Siem di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Wilayah ini telah dihuni sejak masa Kesultanan Aceh dan berkembang sebagai kawasan permukiman masyarakat yang religius.⁶⁵ Keberadaan tokoh ulama seperti Teungku Muhammad Sa'id Krueng Kale menunjukkan bahwa daerah ini telah dikenal luas sebagai pusat keilmuan Islam sejak abad ke-19.⁶⁶

Wilayah ini juga memiliki situs keagamaan seperti makam ulama dan zawiyah. Salah satu tokohnya adalah Teungku Chik Krueng Kale (Syaiikh Isma'il) yang berperan dalam dakwah Islam di Aceh.⁶⁷ Pada masa kolonial Belanda, wilayah ini menjadi bagian dari perlawanan rakyat Aceh. Ulama berperan dalam

⁶⁴ Tim Peneliti Bahasa Aceh, *Kamus Bahasa Aceh* (Banda Aceh: Balai Bahasa, 2010), h. 214.

⁶⁵ Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, *Profil Kecamatan Darussalam* (Aceh Besar: Pemkab Aceh Besar, 2018), h. 12.

⁶⁶ Mapesa Aceh, "Ulama Krueng Kale dalam Lingkungan Sejarah Aceh," 2020, h. 3.

⁶⁷ Mapesa Aceh, "Ekspedisi Sejarah Krueng Kale," 2020, h. 7.

mempertahankan nilai agama dan memimpin masyarakat dalam perjuangan.⁶⁸

Saat ini, Gampong Krueng Kalee tetap dikenal sebagai kawasan religius dan pusat pendidikan Islam dengan keberadaan Dayah Darul Ihsan.⁶⁹

Tabel 1 Penelusuran Sejarah Keuchik Gampong⁷⁰

NO.	PERIODE	NAMA KEUCHIK	SUMBER INFORMASI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1948 – 1958	Tgk. Anzib	Perangkat gampong	
2	1959 – 1968	Ibrahim	Perangkat gampong	
3	1969 – 1975	M. Daud Ubit	Perangkat gampong	
4	1976 – 1979	Razali Raden	Perangkat gampong	
5	1979 – 1988	M.Sulaiman	Perangkat gampong	
6	1988 -1998	Abdul Hamid	Perangkat gampong	
7	1998 – 2014	Abdul Rahman	Perangkat gampong	2 Periode
8	2014 – 2019	Syamsuddin	Perangkat gampong	
9	2019 - 2021	Mudasir	Perangkat gampong	PJ
10	2022 - Sekarang	M. Nasir Ibrahim	Perangkat gampong	

⁶⁸ M. Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh dalam Melawan Kolonialisme* (Banda Aceh, 2005), h. 45.

⁶⁹ Kodepos Indonesia, “Profil Gampong Krueng Kalee,” 2022, h. 1.

⁷⁰ RKPG Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar Tahun 2022

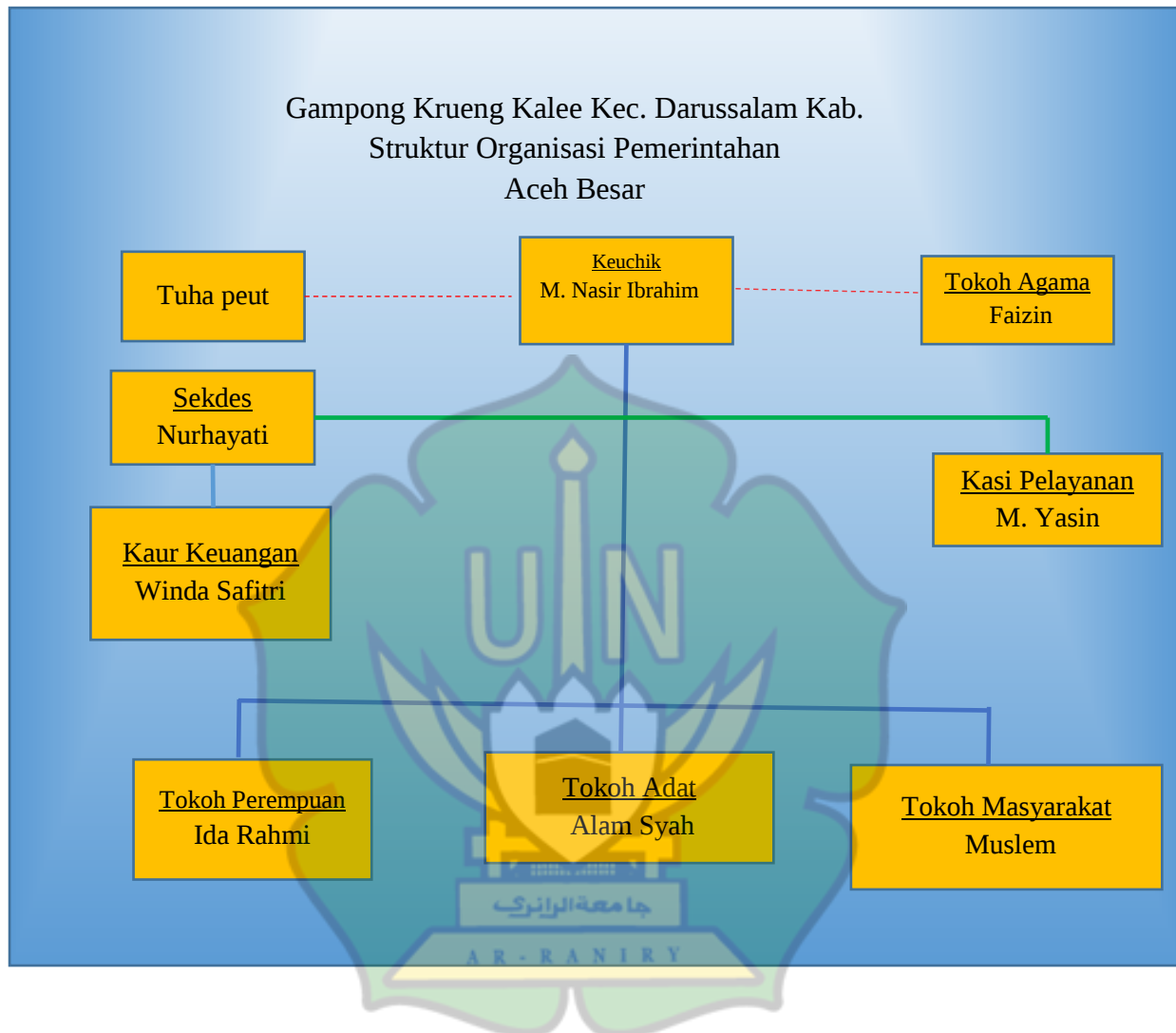
4.1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar

Hubungan kemitraan antara elite adat dan elite agama dalam mengelolah unit teritorial yang terkecil di Aceh yang disebut Gampong dapat dilihat, bahwa tengku meunasah (elite agama) adalah pejabat yang mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan syariat (hukum) dalam sebuah Gampong. Sedangkan Keuchik adalah pejabat yang mewakili adat, karenanya sering disebut Keuchik adalah ayah sedangkan teungku meunasah adalah ibu kepada Gampong tersebut. Kehidupan di Gampong orang segala sesuatu dibicarakan melalui musyawarah, mufakat yaitu sumbang saran untuk mencapai kebulatan pendapat dalam mendukung pelaksanaan sebuah urusan. Dalam mufakat ini diundang juga orang-orang tua dan cerdas pandai yang mampu mewakili pendapat warga dan semua kepentingan umum senantiasanya diurus antara Keuchik bersama perangkat dan tengku meunasah.⁷¹

Pemerintahan Gampong Krueng Kalee memiliki fungsi yang sangat berarti terhadap pelayanan kepentingan masyarakat wilayah tersebut. Terutama berkaitan hubungannya dengan pemerintahan. Struktur kepemimpinan Gampong Krueng Kalee tidak dapat lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di bawahnya. Hal ini dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:⁷²

⁷¹ RKPG Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar Tahun 2022

⁷² RKPG Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar Tahun 2022



4.1.3 Tugas dan Fungsi Pemerintah Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar

Berikut tugas dan fungsi pemerintah gampong (desa), disusun sistematis dan mengacu pada regulasi seperti UU Desa dan qanun Aceh:

1. **Keuchik (Kepala Desa)**

Keuchik adalah pimpinan pemerintahan gampong yang bertugas:⁷³

- a. Menyelenggarakan pemerintahan gampong
- b. Melaksanakan pembangunan gampong
- c. Membina kemasyarakatan
- d. Memberdayakan masyarakat
- e. Menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat
- f. Menjalin kerja sama dengan pihak lain untuk kemajuan gampong

2. **Tuha Peut (Badan Permusyawaratan Gampong)**

Tuha Peut berfungsi sebagai lembaga permusyawaratan, dengan tugas:⁷⁴

- a. Membahas dan menyepakati qanun gampong bersama keuchik
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja keuchik
- d. Membentuk panitia pemilihan keuchik.

3. **Tgk Imum (Imam Gampong)**

Tgk Imum berperan dalam bidang keagamaan:⁷⁵

- a. Memimpin kegiatan keagamaan di gampong
- b. Mengelola kegiatan ibadah dan syiar Islam
- c. Menjadi penasehat keuchik dalam bidang keagamaan

⁷³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 26, h. 10–11.

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 55, h. 22.

⁷⁵ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, h. 15.

- d. Membina akhlak masyarakat.

4. Sekretaris Desa (Sekdes)⁷⁶

Sekdes membantu keuchik dalam administrasi:

- a. Mengelola administrasi pemerintahan
- b. Menyusun laporan kegiatan gampong
- c. Mengelola arsip dan surat-menyurat
- d. Mengkoordinasikan perangkat gampong lainnya

5. Kasi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan bertugas:⁷⁷

- a. Melaksanakan administrasi kependudukan
- b. Mengelola data wilayah dan masyarakat
- c. Membantu penyusunan kebijakan pemerintahan
- d. Mengurus urusan pertanahan dan ketertiban.

6. Kasi Pelayanan

Kasi Pelayanan bertugas:⁷⁸

- a. Memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat
- b. Mengurus surat-surat (domisili, usaha, dan lain-lain.)
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- d. Menangani pengaduan masyarakat.

⁷⁶ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pasal 4, h. 5.

⁷⁷ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, Pasal 6, h. 6.

⁷⁸ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, Pasal 7, h. 7.

7. Kaur Keuangan

Kaur keuangan memiliki fungsi: ⁷⁹

- a. Mengelola keuangan gampong
- b. Menyusun anggaran (APBG)
- c. Melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan
- d. Bertanggung jawab atas transparansi keuangan

8. Kaur Umum dan Perencanaan

Bertugas dalam administrasi umum dan perencanaan: ⁸⁰

- a. Mengelola administrasi umum dan inventaris
- b. Menyusun perencanaan pembangunan gampong
- c. Menyusun dokumen RPJM dan RKP Gampong
- d. Mendukung kegiatan operasional pemerintahan.

9. Kepala Dusun (Kadus)

Kadus merupakan perpanjangan tangan keuchik di wilayah dusun: ⁸¹

- a. Membina masyarakat di tingkat dusun
- b. Menyampaikan informasi dari pemerintah gampong
- c. Membantu pelaksanaan program pembangunan
- d. Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

⁷⁹ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, Pasal 8, h. 8.

⁸⁰ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, Pasal 9, h. 9.

⁸¹ Permendagri Nomor 84 Tahun 2015, Pasal 10, h. 10.

4.1.4 Struktur PKK Srikandi Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar

Struktur organisasi PKK Srikandi Gampong Krueng Kalee disusun untuk mempermudah pelaksanaan program kerja organisasi dalam membantu pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di lingkungan gampong. Struktur organisasi PKK pada umumnya terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa kelompok kerja (Pokja). Adapun struktur PKK Srikandi Gampong Krueng Kalee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi

Pembina

Keuchik Gampong Krueng Kalee

Ketua

Ketua TP-PKK Gampong Krueng Kalee

Wakil Ketua

Wakil Ketua TP-PKK Gampong Krueng Kalee

Sekretaris

1. Sekretaris I
2. Sekretaris II

Bendahara

1. Bendahara I
2. Bendahara II

Kelompok Kerja (Pokja)

Pokja I



Bidang:

1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong

Pokja II

Bidang:

1. Pendidikan dan Keterampilan
2. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

Pokja III

Bidang:

1. Pangan
2. Sandang
3. Tata Laksana Rumah Tangga

Pokja IV

Bidang:

1. Kesehatan
2. Kelestarian Lingkungan Hidup
3. Perencanaan Sehat



Tugas Pokok PKK

PKK memiliki tugas membantu pemerintah gampong dalam:⁸²

1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
2. Memberdayakan perempuan
3. Membina kesehatan keluarga

⁸² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), h. 7–9.

4. Mengembangkan keterampilan masyarakat
5. Menumbuhkan semangat gotong royong.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengurus PKK Gampong Krueng Kalee



Sumber: Data Gampong

4.1.5 Kegiatan PKK Srikandi Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar

PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) Srikandi Gampong Krueng Kalee merupakan organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam membantu pemerintah gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya keluarga. Kegiatan PKK dilaksanakan melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh PKK Srikandi Gampong Krueng Kalee antara lain sebagai berikut:

1. Kegiatan Posyandu

PKK aktif membantu pelaksanaan Posyandu setiap bulan yang meliputi:

- a. Penimbangan balita
- b. Pemberian vitamin dan imunisasi
- c. Penyuluhan kesehatan ibu dan anak
- d. Pemantauan gizi balita

2. Gotong Royong dan Kebersihan Lingkungan

PKK bersama masyarakat melaksanakan kegiatan gotong royong untuk menjaga kebersihan lingkungan gampong, seperti:

- a. Membersihkan saluran air
- b. Membersihkan meunasah dan jalan desa
- c. Penanaman tanaman hias dan obat keluarga

3. Pembinaan Keterampilan Perempuan

PKK mengadakan pelatihan keterampilan bagi ibu-ibu, seperti:

- a. Pelatihan memasak
- b. Kerajinan tangan
- c. Menjahit
- d. Pembuatan usaha kecil rumahan

4. Pengajian dan Pembinaan Keagamaan

Kegiatan keagamaan rutin dilaksanakan untuk meningkatkan nilai religius masyarakat, meliputi:

- a. Pengajian ibu-ibu

- b. Pembacaan Yasin
- c. Ceramah agama
- d. Peringatan hari besar Islam

5. Pembinaan Administrasi PKK

PKK juga melakukan kegiatan administrasi organisasi, seperti:

- a. Pendataan keluarga
- b. Rapat rutin anggota PKK
- c. Penyusunan program kerja tahunan
- d. Evaluasi kegiatan

6. Pemanfaatan Pekarangan

PKK mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah untuk:

- a. Menanam sayuran
- b. Tanaman obat keluarga (TOGA)
- c. Budidaya tanaman pangan sederhana

7. Kegiatan Sosial

PKK turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti:

- a. Membantu masyarakat yang terkena musibah
- b. Menjenguk warga sakit
- c. Santunan kepada masyarakat kurang mampu

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Peran Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Perempuan

Pemerintah gampong memiliki peran penting dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan di lingkungan masyarakat. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, baik sosial, ekonomi, pendidikan, maupun pemerintahan. Pemerintah gampong berfungsi sebagai fasilitator, motivator, dan penggerak dalam pelaksanaan berbagai program pemberdayaan perempuan di tingkat desa.

4.2.1.1 Peran Pemerintah Gampong sebagai Fasilitator

1. Menyusun dan menyediakan program pemberdayaan perempuan.
2. Memfasilitasi kegiatan PKK sebagai wadah pemberdayaan perempuan.
3. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi perempuan.
4. Memfasilitasi pelatihan keterampilan bagi perempuan.
5. Memberikan dukungan terhadap kegiatan usaha perempuan.
6. Memfasilitasi akses perempuan terhadap modal dan sumber daya ekonomi.
7. Membantu perempuan dalam mengembangkan kegiatan usaha produktif.

4.2.1.2 Peran Pemerintah Gampong sebagai Motivator

1. Memberikan motivasi kepada perempuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan.
2. Mendorong perempuan untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan.
3. Mendorong perempuan agar memiliki usaha yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga.
4. Memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pentingnya kemandirian ekonomi.
5. Mendorong perempuan agar lebih aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi gampong.
6. Memberikan dorongan kepada perempuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

4.2.1.3 Peran Pemerintah Gampong sebagai Penggerak/Dinamisator

1. Menggerakkan perempuan untuk berpartisipasi dalam program pemberdayaan.
2. Mendorong pelaksanaan kegiatan ekonomi produktif perempuan.
3. Mengembangkan kegiatan PKK yang berkaitan dengan peningkatan ekonomi keluarga.
4. Mendorong pembentukan dan pengembangan kelompok usaha perempuan.
5. Membangun kerja sama antara pemerintah gampong, PKK, dan kelompok perempuan.
6. Menggerakkan perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan gampong.

7. Mendorong keterlibatan perempuan dalam musyawarah gampong.

4.2.1.4 Peran Pemerintah Gampong dalam Peningkatan Keterampilan

Perempuan

1. Menyelenggarakan pelatihan keterampilan.
2. Memberikan pelatihan menjahit.
3. Memberikan pelatihan memasak atau pengolahan makanan.
4. Memberikan pelatihan kerajinan tangan.
5. Memberikan pelatihan kewirausahaan.
6. Memberikan pendampingan setelah pelatihan.
7. Mendorong hasil pelatihan agar dapat dikembangkan menjadi kegiatan usaha.

4.2.1.5 Peran Pemerintah Gampong dalam Meningkatkan Partisipasi

Perempuan

1. Memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengikuti kegiatan gampong.
2. Melibatkan perempuan dalam kegiatan PKK.
3. Memberikan kesempatan perempuan menyampaikan aspirasi dalam musyawarah gampong.
4. Melibatkan perempuan dalam kegiatan pembangunan gampong.
5. Mendorong perempuan berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan ekonomi.

6. Memberikan ruang bagi perempuan untuk berperan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

4.2.1.6 Peran Pemerintah Gampong dalam Meningkatkan Kemandirian

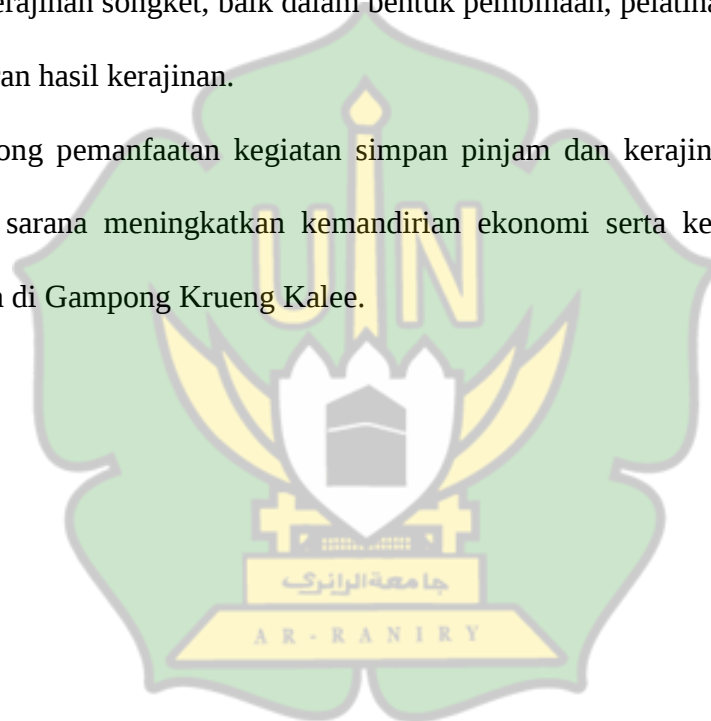
Ekonomi Perempuan

1. Mendorong perempuan memiliki kegiatan ekonomi produktif.
2. Membantu meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengelola usaha.
3. Mendorong perempuan memperoleh penghasilan sendiri.
4. Membantu perempuan meningkatkan pendapatan keluarga.
5. Mendorong perempuan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia di gampong.
6. Meningkatkan kemampuan perempuan dalam mengembangkan usaha secara mandiri.

4.2.1.7 Peran Pemerintah Gampong melalui PKK dan Kegiatan Sosial

1. Mendukung pelaksanaan kegiatan PKK.
2. Mendorong kegiatan PKK yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga.
3. Mendukung kegiatan Posyandu yang melibatkan perempuan.
4. Memberikan penyuluhan terkait kesehatan ibu dan anak.
5. Mendukung kegiatan pendidikan keluarga.
6. Mengembangkan kegiatan sosial yang dapat meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarga.

7. Mendukung kegiatan simpan pinjam melalui kelompok perempuan sebagai upaya membantu permodalan dan pengembangan usaha ekonomi perempuan.
8. Mendorong dan mendukung kegiatan kerajinan songket sebagai salah satu bentuk pemberdayaan perempuan melalui peningkatan keterampilan, pelestarian budaya, dan pengembangan sumber pendapatan keluarga.
9. Memberikan dukungan terhadap kelompok perempuan yang menjalankan usaha kerajinan songket, baik dalam bentuk pembinaan, pelatihan, maupun pemasaran hasil kerajinan.
10. Mendorong pemanfaatan kegiatan simpan pinjam dan kerajinan songket sebagai sarana meningkatkan kemandirian ekonomi serta kesejahteraan keluarga di Gampong Krueng Kalee.



Tabel 1 Program-Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

No.	Nama Program	Jumlah Peserta	Tahun		Hasil Program	Kelanjutan Program
			Perencanaan	Pelaksanaan		
1	Simpan Pinjam Perempuan (SPP)	Untuk Semua Masyarakat desa	2010	Sekarang	a. Kueh pagi b. Nasi pagi c. klontong	Target Pengembalian 10 bulan
2	Tenun/Songket	15 Pekerja	2024	Sekarang	Kain songket	Pameran Pemasaran
3	Program yang Pernah dibuat tapi tidak berjalan a. Kede Kupa Gampong b. Tempat konter		2025	-		
4	Yang baru Diprogramkan a. Pelatihan menjahit b. Bate ranup		2025	-		

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa program pemberdayaan masyarakat yang telah dan akan dilaksanakan di Gampong Krueng Kalee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar. Program tersebut meliputi program ekonomi, keterampilan, serta usaha masyarakat.

a. Program pertama yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Program pertama yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang ditujukan untuk seluruh masyarakat desa. Program ini bertujuan membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha kecil seperti usaha kue pagi, nasi pagi, dan usaha kelontong. Dalam pelaksanaannya, program ini memiliki target pengembalian pinjaman selama 10 bulan dan masih berjalan hingga saat ini. Program kedua adalah tenun/songket yang melibatkan 15 pekerja. Program ini menghasilkan kain songket sebagai produk kerajinan masyarakat. Untuk keberlanjutan program, hasil tenun dipromosikan melalui kegiatan pameran dan pemasaran sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bertujuan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya perempuan, melalui pemberian bantuan modal usaha. Program ini mulai berjalan sejak tahun 2010 dan hingga saat ini masih aktif dilaksanakan di gampong. Sasaran program tidak hanya ditujukan kepada kelompok tertentu, tetapi terbuka bagi masyarakat desa yang memiliki usaha kecil maupun yang ingin memulai usaha mandiri. Keberadaan program ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah gampong dalam meningkatkan perekonomian keluarga dan mengurangi kesulitan masyarakat dalam memperoleh modal usaha.

Berdasarkan kondisi di lapangan, program SPP memberikan dampak yang cukup positif bagi masyarakat. Dana pinjaman yang diberikan dimanfaatkan

masyarakat untuk menjalankan berbagai jenis usaha kecil, seperti usaha kue pagi, nasi pagi, dan kios kelontong. Beberapa masyarakat memulai usaha dari skala kecil di rumah masing-masing, kemudian secara bertahap mampu menambah jumlah produksi dan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa program SPP tidak hanya membantu masyarakat memperoleh modal, tetapi juga mendorong tumbuhnya semangat berwirausaha dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat yang menerima pinjaman diberikan target pengembalian selama 10 bulan. Sistem pengembalian tersebut dinilai cukup membantu karena masyarakat dapat mencicil sesuai kemampuan usaha yang dijalankan. Selain itu, adanya aturan pengembalian membuat dana program dapat terus diputar dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat lainnya yang membutuhkan modal usaha. Pengelolaan program dilakukan melalui kerja sama antara pengurus program dan pemerintah gampong sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih teratur dan terkontrol.

Kondisi di lapangan juga menunjukkan bahwa program SPP mendapat antusiasme yang baik dari masyarakat, terutama perempuan. Program ini membantu perempuan menjadi lebih aktif dalam kegiatan ekonomi keluarga dan memberikan peluang untuk menambah pendapatan rumah tangga. Sebagian penerima manfaat mengaku bahwa hasil usaha dari program tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, biaya pendidikan anak, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Selain memberikan manfaat ekonomi, program ini juga memperkuat hubungan sosial masyarakat karena adanya kerja sama dan rasa tanggung jawab bersama dalam menjaga keberlangsungan program.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu penerima manfaat program SPP, masyarakat merasa program ini sangat membantu dalam memperoleh modal usaha tanpa harus meminjam kepada pihak lain dengan bunga tinggi. Salah seorang warga menyampaikan:

“Dengan adanya program SPP ini, saya bisa membuka usaha kue pagi di rumah. Hasilnya dapat membantu kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan lain yang merupakan anggota Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), program ini dinilai memberikan manfaat yang signifikan dalam mengembangkan usaha serta meningkatkan pendapatan keluarga. Salah seorang informan menyampaikan:

"Sebelum ikut Program SPP, usaha saya hanya kecil-kecilan karena modalnya terbatas. Setelah mendapatkan pinjaman, saya bisa menambah barang dagangan sehingga keuntungan yang diperoleh juga meningkat. Penghasilannya memang belum besar, tetapi sudah cukup membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga."

Selain itu, informan lain juga mengungkapkan bahwa Program SPP tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan semangat bekerja sama di antara anggota kelompok. Informan tersebut menyatakan:

"Kami selalu saling mengingatkan kalau sudah mendekati waktu angsuran. Kalau ada anggota yang mengalami kesulitan, kami biasanya berdiskusi bersama untuk mencari solusi. Dengan begitu, kelompok tetap kompak dan usaha masing-masing bisa terus berjalan."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak hanya berperan dalam memberikan akses permodalan kepada perempuan, tetapi juga mendorong terbentuknya kerja sama, rasa tanggung jawab, dan solidaritas antaranggota kelompok. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan program sekaligus

berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Interaksi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan pengurus program. Para anggota kelompok saling mengingatkan terkait jadwal pengembalian pinjaman dan saling mendukung dalam pengembangan usaha. Pemerintah gampong juga aktif memantau perkembangan program sehingga pelaksanaannya tetap berjalan tertib dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dapat dikatakan berjalan cukup baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa. Keberhasilan program terlihat dari keberlangsungannya yang mampu bertahan hingga sekarang serta meningkatnya aktivitas usaha kecil masyarakat. Dengan adanya dukungan pemerintah gampong dan partisipasi aktif masyarakat, program ini memiliki potensi untuk terus berkembang sebagai salah satu program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), pemerintah gampong memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran tersebut dilakukan melalui pemberian dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengawasan terhadap penggunaan dan pengembalian dana pinjaman, serta koordinasi dengan pengurus program dan masyarakat penerima manfaat. Pemerintah gampong juga mendorong agar dana pinjaman digunakan secara produktif untuk mengembangkan usaha kecil yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Dengan adanya keterlibatan pemerintah gampong,

pelaksanaan program menjadi lebih terarah dan dapat dipantau sehingga dana yang tersedia dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat lainnya.

Selain itu, pemerintah gampong berperan dalam memberikan motivasi dan dorongan kepada perempuan agar memanfaatkan peluang usaha yang tersedia melalui Program SPP. Pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang mendukung dari sisi administrasi, tetapi juga sebagai fasilitator dalam membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kemandirian ekonomi. Dukungan tersebut terlihat dari adanya komunikasi antara pemerintah gampong, pengurus kelompok, dan anggota penerima pinjaman dalam menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi selama menjalankan usaha maupun memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman.

Peran pemerintah gampong juga terlihat dalam menjaga keberlanjutan Program SPP melalui pemantauan terhadap kelompok penerima manfaat dan memastikan kegiatan simpan pinjam tetap berjalan sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah gampong memberikan ruang kepada masyarakat, khususnya perempuan, untuk mengembangkan usaha berdasarkan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian, keberadaan pemerintah gampong menjadi salah satu faktor pendukung dalam meningkatkan akses perempuan terhadap modal usaha, mengembangkan kegiatan ekonomi produktif, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah gampong dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak hanya sebatas memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program, tetapi juga

mencakup peran sebagai fasilitator, pengawas, motivator, dan pendukung keberlanjutan program. Peran tersebut memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kesempatan perempuan dalam mengembangkan usaha, memperoleh tambahan pendapatan, serta membangun kemandirian ekonomi keluarga.

b. Program Tenun/songket

Program tenun/songket merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang mulai dilaksanakan pada tahun 2024 dengan melibatkan sekitar 15 pekerja, yang mayoritas terdiri dari perempuan. Program ini dibentuk sebagai upaya pemerintah gampong dalam meningkatkan keterampilan masyarakat sekaligus melestarikan budaya lokal melalui kerajinan tradisional kain songket. Selain bertujuan menjaga warisan budaya daerah, program ini juga diarahkan untuk menciptakan peluang usaha dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat desa.

Berdasarkan kondisi di lapangan, program tenun/songket menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan mendapat respons positif dari masyarakat. Para peserta terlihat antusias mengikuti kegiatan menenun karena program ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperoleh keterampilan baru yang memiliki nilai ekonomi. Dalam pelaksanaannya, para pekerja melakukan proses pembuatan kain songket secara bertahap mulai dari persiapan benang, pewarnaan, penyusunan pola, hingga proses penenunan. Hasil tenun yang diproduksi memiliki motif khas daerah yang mencerminkan identitas budaya lokal sehingga memiliki

daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun pengunjung luar daerah.

Keberadaan program tenun/songket juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, khususnya perempuan. Sebagian peserta program sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap, namun setelah mengikuti kegiatan tenun mereka memperoleh tambahan penghasilan dari hasil penjualan kain songket. Selain itu, program ini membantu meningkatkan rasa percaya diri dan kemandirian perempuan karena mereka dapat berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Di lapangan terlihat adanya semangat kerja sama dan saling membantu antaranggota kelompok dalam menyelesaikan proses produksi kain tenun.

Dalam aspek pemasaran, hasil produksi kain songket telah diperkenalkan melalui kegiatan pameran dan promosi kerajinan lokal. Kegiatan tersebut membantu masyarakat memperluas jaringan pemasaran dan memperkenalkan hasil kerajinan gampong kepada masyarakat yang lebih luas. Pemerintah gampong juga memberikan dukungan terhadap keberlangsungan program dengan membantu penyediaan fasilitas serta mendorong pengembangan usaha kerajinan agar dapat menjadi produk unggulan desa.

Secara keseluruhan, kondisi program tenun/songket di lapangan dapat dikatakan cukup baik karena mampu menjadi sarana pemberdayaan ekonomi sekaligus pelestarian budaya daerah. Program ini tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga membangun kreativitas, keterampilan, dan semangat usaha masyarakat desa. Dengan dukungan yang berkelanjutan, program tenun/songket memiliki potensi

besar untuk berkembang menjadi usaha ekonomi kreatif yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat identitas budaya lokal.

Hasil wawancara dengan peserta program tenun/songket menunjukkan bahwa program ini memberikan manfaat tidak hanya dalam bidang ekonomi tetapi juga dalam peningkatan keterampilan masyarakat. Salah satu peserta mengatakan:

“Sebelumnya saya tidak memiliki pekerjaan tetap, tetapi setelah mengikuti program tenun saya bisa memperoleh penghasilan tambahan dari hasil penjualan kain songket.”

Interaksi antaranggota kelompok terlihat cukup baik karena para peserta saling membantu dalam proses penenunan dan berbagi pengetahuan mengenai motif serta teknik pembuatan kain. Selain itu, masyarakat merasa bangga karena hasil kerajinan mereka dipromosikan melalui pameran sehingga budaya lokal semakin dikenal oleh masyarakat luar daerah.

Dalam pelaksanaan program tenun/songket, pemerintah gampong memiliki peran sebagai fasilitator, motivator, pengawas, dan pendukung dalam pengembangan keterampilan serta usaha ekonomi masyarakat, khususnya perempuan. Peran sebagai fasilitator diwujudkan melalui dukungan terhadap penyediaan fasilitas dan sarana yang dibutuhkan dalam proses produksi kain songket. Pemerintah gampong juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan keterampilan menenun serta mendorong kelompok perempuan agar dapat berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan ekonomi produktif. Dukungan tersebut menjadi salah satu faktor yang membantu program tenun/songket tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pemerintah gampong juga berperan dalam mendorong pemasaran hasil

produksi dengan memberikan dukungan terhadap kegiatan promosi dan pameran kerajinan lokal. Melalui kegiatan tersebut, produk songket tidak hanya dikenal oleh masyarakat setempat, tetapi juga berpeluang dipasarkan kepada masyarakat dari luar daerah. Upaya pemasaran ini penting dilakukan agar hasil produksi memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan dapat memberikan tambahan pendapatan bagi para pekerja. Dengan demikian, pemerintah gampong tidak hanya berperan dalam mendukung proses produksi, tetapi juga dalam membantu membuka peluang pemasaran bagi hasil kerajinan masyarakat.

Selain itu, pemerintah gampong berperan dalam menjaga keberlanjutan program dengan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan mendorong masyarakat untuk terus mengembangkan keterampilan yang telah diperoleh. Pemerintah juga berupaya mengambil pelajaran dari program sebelumnya yang tidak dapat dilanjutkan, seperti kedai kopi gampong dan tempat konter, agar program pemberdayaan berikutnya dapat direncanakan dengan lebih matang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah gampong berusaha melakukan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan serta menyesuaikan program baru dengan potensi ekonomi yang ada di masyarakat.

Dalam kaitannya dengan program yang sedang direncanakan, yaitu pelatihan menjahit dan bate ranup, pemerintah gampong memiliki peran dalam memfasilitasi proses perencanaan, memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pelatihan, serta mendorong keterlibatan perempuan sebagai peserta. Program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan keterampilan baru, tetapi juga

dapat dikembangkan menjadi kegiatan usaha yang menghasilkan pendapatan. Pemerintah gampong dapat memberikan pembinaan dan pendampingan agar keterampilan yang diperoleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sebagai peluang usaha.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah gampong dalam program tenun/songket mencakup penyediaan dukungan dan fasilitas, pemberian motivasi, pengawasan, pengembangan keterampilan, serta dukungan terhadap promosi dan pemasaran hasil produksi. Peran tersebut memberikan kontribusi terhadap peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi perempuan sekaligus mendukung pelestarian budaya lokal. Keberlanjutan program sangat dipengaruhi oleh konsistensi dukungan pemerintah gampong dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan hasil kerajinan menjadi kegiatan ekonomi yang produktif.

Selain program yang berjalan, terdapat pula program yang pernah dibuat tetapi tidak berjalan lagi, yaitu kedai kopi gampong dan tempat konter. Program tersebut tidak dapat dilanjutkan sehingga tidak berkembang sebagaimana yang direncanakan. Selanjutnya, terdapat program baru yang sedang direncanakan, yaitu pelatihan menjahit dan bate ranup. Program ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya perempuan, sehingga mampu menciptakan peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

4.2.2 Faktor Penghambat Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Perempuan

Pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Gampong Krueng Kalee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi keberhasilan program yang dijalankan pemerintah gampong. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari faktor ekonomi dan keterbatasan fasilitas, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi masyarakat, budaya sosial, dan kurangnya pendampingan program secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil observasi penelitian, beberapa program pemberdayaan perempuan memang telah dijalankan, seperti Simpan Pinjam Perempuan (SPP), usaha tenun/songket, serta program pelatihan menjahit yang sedang direncanakan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan program belum berjalan optimal.

Salah satu faktor penghambat utama adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam mengikuti kegiatan pemberdayaan. Sebagian perempuan masih memiliki keterbatasan waktu karena harus menjalankan peran domestik sebagai ibu rumah tangga sehingga kurang aktif mengikuti pelatihan maupun kegiatan organisasi desa.⁸³ Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan program pemberdayaan tidak berjalan maksimal karena keterlibatan masyarakat perempuan masih terbatas.⁸⁴ Hasil penelitian terbaru tentang partisipasi perempuan dalam program pembangunan desa menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan di desa

⁸³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 243.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, h. 243.

masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, tingkat pendidikan, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Kondisi ini sejalan dengan jurnal terbaru yang menyatakan bahwa penggunaan Dana Desa di Indonesia masih lebih dominan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dibandingkan program pemberdayaan perempuan dan penguatan ekonomi masyarakat desa.

Faktor berikutnya adalah rendahnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan usaha dan pemasaran produk.⁸⁵ Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) memang telah membantu masyarakat dalam membuka usaha kecil seperti jualan kue pagi, nasi pagi, dan kelontong. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha secara mandiri karena kurangnya pengetahuan tentang manajemen usaha dan pemasaran modern. Hal ini juga terlihat pada program kede kupa gampong dan tempat konter yang pernah dibuat namun akhirnya tidak berjalan.⁸⁶ Penelitian terbaru mengenai pemberdayaan perempuan di desa pesisir menunjukkan bahwa keterbatasan alat produksi, rendahnya pelatihan kewirausahaan, dan kurangnya akses pemasaran menjadi faktor utama terhambatnya usaha perempuan desa.

Selain itu, kurangnya pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan dari pemerintah maupun lembaga terkait juga menjadi penghambat dalam pemberdayaan perempuan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan modal, tetapi juga memerlukan arahan, pengawasan, dan motivasi agar usaha yang

⁸⁵ Hasil observasi program pemberdayaan masyarakat di Gampong Krueng Kalee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, 2026.

⁸⁶ Hasil observasi program pemberdayaan masyarakat di Gampong Krueng Kalee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, 2026.

dijalankan dapat berkembang dan bertahan dalam jangka panjang.⁸⁷ Penelitian terbaru mengenai pemberdayaan perempuan melalui peran kepala desa menunjukkan bahwa keberhasilan program pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif pemerintah desa dalam memberikan pendampingan, fasilitasi, dan pengawasan terhadap kelompok perempuan desa.

Hambatan lainnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pemberdayaan. Kurangnya tempat pelatihan, alat produksi, dan akses pemasaran menyebabkan kegiatan usaha masyarakat belum berkembang secara luas.⁸⁸ Produk kain songket yang dihasilkan masyarakat misalnya masih dipasarkan secara sederhana melalui pameran tertentu dan belum memanfaatkan teknologi digital secara maksimal. Padahal perkembangan teknologi pemasaran digital sangat penting dalam mendukung usaha masyarakat desa.⁸⁹ Penelitian terbaru tentang strategi pemberdayaan ekonomi perempuan desa juga menjelaskan bahwa rendahnya literasi digital dan keterbatasan jaringan pemasaran menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha perempuan desa.

Dengan adanya berbagai hambatan tersebut, pemerintah gampong diharapkan dapat meningkatkan kerja sama dengan PKK, lembaga desa, dan instansi terkait dalam memberikan pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta pendampingan yang berkelanjutan kepada perempuan desa. Selain itu,

⁸⁷ Ani Trianingsih Anggraini dan Isna Fitria Agustina, "Pemberdayaan Perempuan melalui Peran Kepala Desa," *Indonesian Journal of Public Policy Review*, Vol. 25 No. 1, 2024

⁸⁸ Finanda Amelia Wattimena dkk., "Strategi Pengembangan Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Usaha Kecil di Desa Pesisir," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 12 No. 1, 2024.

⁸⁹ Finanda Amelia Wattimena dkk., "Strategi Pengembangan Pemberdayaan Perempuan Dalam Mendukung Usaha Kecil di Desa Pesisir," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 12 No. 1, 2024.

peningkatan partisipasi perempuan dalam musyawarah dan pembangunan desa juga perlu terus didorong agar perempuan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Pemerintah Gampong Krueng Kalee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Gampong Krueng Kalee telah berperan dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan, dukungan kelompok usaha, dan kegiatan ekonomi produktif. Peran tersebut dapat dilihat melalui indikator expectation, norm, performance, dan evaluation.
2. Pemberdayaan ekonomi perempuan didukung oleh pemerintah gampong, partisipasi masyarakat, kelompok usaha, dan semangat perempuan, sedangkan hambatannya meliputi keterbatasan anggaran, keterampilan, partisipasi, dan akses pemasaran. Oleh karena itu, diperlukan program yang lebih terarah, berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Gampong Krueng Kalee diharapkan dapat meningkatkan program pemberdayaan ekonomi perempuan secara berkelanjutan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta pendampingan usaha bagi perempuan.
2. Pemerintah gampong diharapkan lebih aktif melibatkan perempuan dalam musyawarah dan pengambilan keputusan terkait pembangunan gampong agar perempuan memiliki kesempatan yang lebih besar dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka.
3. Perlu adanya kerja sama antara pemerintah gampong dengan instansi terkait, seperti dinas pemberdayaan masyarakat, UMKM, maupun lembaga pelatihan untuk mendukung pengembangan usaha perempuan di gampong.
4. Masyarakat, khususnya perempuan, diharapkan lebih aktif berpartisipasi dalam program pemberdayaan yang diselenggarakan pemerintah agar dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kesejahteraan ekonomi keluarga.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai efektivitas program pemberdayaan ekonomi perempuan serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A., dan C. Narkubo. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Aini, Z. Qurrotu. 2018. “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pencapaian Masalah Masyarakat Lokal Sekitar Wisata Taman Buah Mangunan Imogiri Bantul”. *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Anwas, O. M. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- Bachtiar. 2015. *Problematisasi Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pengujian UU Terhadap UUD*. Jakarta: Swadaya Grup.
- Creswell, J. W., P. Clark. 2011. *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Fitrina, N. R. 2016. “Pemberdayaan Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Melalui Industri Kecil Di Pedesaan: Studi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Serang Di Desa Pulorejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan”. *Skripsi*, Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Gusmeri. Z. Fuad., N. Herawati., Parmakope., Marwiyati., L. Wijaya., Bustami. (2019). *Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Hasanah, U., & N. Musyafak. 2018. “Gender and Politics: Keterlibatan Perempuan dalam Pembangunan Politik”. *Jurnal Studi Gender*, 2018, 12 (03): 409-432.
- Hayati, I. 2021 “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Perempuan: Studi Kasus Desa Lamamek, Kecamatan Simeulue Barat, Kabupaten Simeulue, Provinsi Aceh”. *Skripsi*, Medan: Universitas Medan Area.
- Iskandar. “Gender dan Problematisasi Ekonomi Perempuan Aceh”. *Saree: Research in Gender Studies*, 2022, 4 (2): 116-130.
- Kamil, M. 2011. *Pendidikan Nonformal*. Bandung: Alfabeta.
- Kansil, S. T., C. Kansil. 2004. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Kountur, R. 2007. *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM.
- Kurniawati, 2013. "Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi: Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto". *Jurnal Administrasi Publik*, 1 (4): 9-14.
- Kusumah, W. dan D. Dwitagama. 2011. *Mengenal Penelitian Tindakan Kelas* Jakarta: PT. Indeks Khasanah.
- Ma'arif, A. S. 2003. *Pembangunan dalam Perspektif Gender*. Malang: UMM Press.
- Mardikanto, T. 2014. *Corporate Social Responsibility: Tanggungjawab Sosial Korporasi*. Bandung: Alfabeta.
- Mardikanto, T., P. Soebiato. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Marwanti, S. & I. D. Astuti, 2012. "Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Pengembangan Kewirausahaan Keluarga Menuju Ekonomi Kreatif di Kabupaten Karanganyar". *Sepa*, 9(1): 134-144.
- Moleong, J. Lexy. 2002. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslim, A. 2009. *Metodologi Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Teras.
- Mustika, Fitria. 2019. "Pemberdayaan Perempuan Melalui Program Badan Usaha Milik Gampong (BUMG): Studi di Gampong Lamkeneung Aceh Besar". *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Najiati, S., A. Asmana., & I. N. N. Suryadinata. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International.
- Narkowo, J. D. 2010. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ndraha, T. 2000. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD.
- Nur, S. 2019. "Pemberdayaan Perempuan untuk Kesetaraan dan Meningkatkan Partisipasi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup". *AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 10 (1): 99-111.

- Rasyid, R. 2002. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widia.
- Saifullah. 2006. *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Malang: Fakultas Syariah UIN.
- Salim, P., Y. Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Sarwono, S. W. (2015). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soekanto, S., B. Sulistyowati. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto**, E. 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerja Sosial*. Bandung: PT. Ravika Adimatama.
- Sujarweni, W. 2014. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustakabaru Press.
- Sumaryadi, I. N. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Syafi'i, A. A. 2001. *Manajemen Masyarakat Islam*. Bandung: Gerbang Masyarakat Baru.
- Syafiie, I. K. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Thoha, M. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Torang, S. 2014. *Organisasi dan Manajemen: Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. 2015. *Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory*. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Informan Kunci (Kepala Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)

8. Seberapa besar upaya yang pemerintah lakukan untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan?
9. Seberapa penting pemerintah memandang peran perempuan dalam kehidupan masyarakat?
10. Adakah pemerintah melibatkan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat?
11. Adakah peran khusus yang pemerintah berikan kepada perempuan?

Informan Utama (Ketua PKK Srikandi Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)

1. Bagaimana menurut pandangan anda tentang upaya pemberdayaan yang pemerintah berikan?
2. Aktifitas/kegiatan apasaja yang kalian lakukan?
3. Bagaimana keberlangsungan aktivitas/kegiatan yang kalian lakukan?
4. Adakah pemerintah yang datang untuk sosialisasi tentang pentingnya pemberdayaan perempuan?

Informan Tambahan Masyarakat

1. Bagaimana menurut anda melihat upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan?
2. Apakah anda telah merasakan dampak dari upaya pemberdayaan perempuan yang pemerintah upayakan?

Lampiran 2. Dokumentasi Kegiatan

Bersama Kepala Desa Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, Bapak (Nama Kepala Desa) yang menjadi informan Utama Peneliti



Bersama Ketua PKK Srikandi Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, Ibuk (Nama) yang menjadi informan utama peneliti



Bersama perwakilan masyarakat perempuan, Ibuk (Nama) yang juga menjadi informan tambahan peneliti



Kegiatan PKK Srikandi Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar: (Nama Kegiatan)



Kantor Kepala Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar



Gedung pemuda dan PKK Gampong Krueng Kalee Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar



Lampiran 3. Surat Pengantar Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 102/Un.08/FISIP/Kp.07.6/01/2026

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;

b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;

7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statute UIN Ar-Raniry banda Aceh ;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Pencatatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **02 November 2023**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Dr. S. Amirul Kamar, MM., M.Si. Sebagai pembimbing I

2. Hiyah Saputra, S.Pd.I., M.Sos. Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : Nadul Aulfar

NIM : 190802105

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Peran Pemerintah Gampong Krweg Kalee Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

KEDUA : Segala pembiayaan yang dikeluarkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 23 Januari 2026
 DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
 DAN ILMU PEMERINTAHAN,
 MUHAMMAD MULIA

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk disetujui dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 4. Surat Penelitian Ilmiah Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321. Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1316/Un.08/FISIPI/PP.00.9/07/2024
 Lamp : -
 Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepada Kepala Desa Gampung Krueng kalee
2. kepada kepala seksi pemerintah
3. kepada Ketua PKK .

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Nailul Aufar / 190802105**
 Semester/Jurusan : **X / Ilmu Administrasi Negara**
 Alamat sekarang : **Lambaroe angan gampong cot**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Peran pemerintah gampung krueng kalee kecamatan darussalam kabupaten aceh besar dalam pemberdayaan ekonomi perempuan .**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Juli 2024
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Eka Januar, M.Soc.Sc.

Berlaku sampai : 16 Januari 2025